

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang dibentuk pada 17 Oktober 2001 secara resmi dan tercantum dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2001 dimana Kota Tasikmalaya menjadi daerah otonom di Indonesia oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia saat itu. Pada awal pembentukannya Kota Tasikmalaya hanya memiliki tiga kecamatan dan 13 kelurahan sebagai wilayah otonomnya, seiring berjalannya waktu saat ini Kota Tasikmalaya mengalami perkembangan wilayah dengan memiliki delapan kecamatan dan 69 Kelurahan ([jabarprov.go.id](http://jabarprov.go.id)).

Sebagai wilayah otonom di Indonesia, Kota Tasikmalaya memiliki fungsi pemerintahan dan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam mengembang fungsinya tersebut Kota Tasikmalaya memiliki Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) guna terlaksananya pelayanan publik yang optimal. SKPD tersebut mengemban tugas atas wewenang yang diberikan oleh Kepala Daerah dengan membuat pertanggungjawaban dalam kewenangan yang diberikannya output tersebut berupa Laporan Keuangan dari setiap SKPD sehingga dihasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan demikian SKPD dapat dikatakan sebagai entitas akuntansi (*accounting entity*) yang berkewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan daerah.

Menurut Ramadhania (2020), kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut yang mendasari adanya pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga diambil objek penelitian Kota Tasikmalaya karena mengacu pada nilai SAKIP untuk tahun 2019 di wilayah Priangan Timur memeringkatkan urutan pertama dalam penilaiannya.

**Tabel 1.1.**  
**Evaluasi Hasil SAKIP Wilayah Priangan Timur**

<b>Entitas Daerah</b>	<b>Skor</b>	<b>Predikat</b>
Kota Tasikmalaya	71,09	BB
Kabupaten Garut	70,80	BB
Kabupaten Sumedang	67,26	B
Kota Banjar	67	B
Kabupaten Ciamis	66,26	B
Kabupaten Tasikmalaya	-	B
Kabupaten Pangandaran	-	B

*Sumber: jabar.tribunnews.com (2020)*

Berdasarkan data pada tabel di atas Kota Tasikmalaya memiliki kompetensi Sumber Daya Manusia yang sangat baik dibanding wilayah lain yang berada di kawasan Priangan Timur. Menurut Budi Budiman selaku walikota Tasikmalaya dengan diraihnya penghargaan SAKIP predikat BB ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan di wilayah Kota Tasikmalaya baik dari perencanaan, keterukuran anggaran, efisiensi anggaran relatif sudah berjalan dengan baik. Menurut Budi Budiman harapan Kota Tasikmalaya kedepan dengan anggaran yang dimiliki pembangunan di Kota Tasikmalaya harus lebih efektif, efisien, dan akuntabilitasnya benar-benar dapat kita pertanggungjawabkan, sehingga apa yang menjadi capaian dan indikator kinerja utama Pembangunan di Kota Tasikmalaya dapat terpenuhi (*news.koropak.co.id*, (2020)).

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai kualitas laporan keuangan daerah adalah sebuah kesesuaian dengan standar yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Laporan keuangan merupakan faktor penting bagi

pemerintah yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan dan merupakan sebuah media bagi entitas (pemerintah) untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik (Oktavia, 2019). Dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik tersebut merupakan syarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2020) menjabarkan bahwa informasi yang bermanfaat adalah informasi yang memiliki kualitas (*reliable*). Kualitas informasi memiliki aspek jujur (*faithful representation*) apa yang dituangkan secara jujur dan wajar.

Menurut Yadiati dan Mubarok (2017) pengukuran kualitas laporan keuangan daerah dilihat dari opini yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan masing-masing daerah terbagi menjadi 4, diantaranya: (1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini yang dikeluarkan karena hasil pemeriksaan telah terbebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material. (2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini yang dikeluarkan karena hasil pemeriksaan ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam bukti-bukti pemeriksaan, namun tidak memengaruhi kewajaran dalam Laporan Keuangan karena penyajian dilakukan sesuai dengan SAP hanya saja tidak material pemeriksa tidak memperoleh keyakinan yang material. (3) Tidak Wajar (TW) adalah opini yang dikeluarkan karena pemeriksa meyakini bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan mengandung banyak kesalahan dan kekeliruan material. (4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP) adalah opini yang dikeluarkan karena pemeriksa tidak bisa meyakini bahwa laporan keuangan tersebut benar atau salah yang disebabkan oleh kurangnya bukti-bukti yang diterima pemeriksa seperti laporan keuangan tidak sesuai dengan SAP.

**Tabel 1.2.**  
**Trend Opini Audit LKPD Jawa Barat 2017-2019**

Entitas Daerah	Opini Audit 2017	Opini Audit 2018	Opini Audit 2019
Provinsi Jawa Barat	WTP	WTP	WTP
Kab. Bandung	WTP	WTP	WTP
Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WTP
Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP
Kab. Bogor	WTP	WTP	WTP
Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP
Kab. Cianjur	WTP	WDP	WTP
Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP
Kab. Garut	WTP	WTP	WTP
Kab. Indramayu	WTP	WTP	WTP
Kab. Karawang	WTP	WTP	WTP
Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP
Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP
Kab. Pangandaran	WTP	WTP	WTP
Kab. Purwakarta	WTP	WTP	WTP
Kab. Subang	WDP	WTP	WTP
Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP
Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP
Kab. Tasikmalaya	WTP	WDP	WTP
Kota Bandung	WDP	WTP	WTP
Kota Banjar	WTP	WTP	WTP
Kota Bekasi	WTP	WTP	WTP
Kota Bogor	WTP	WTP	WTP
Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP
Kota Cirebon	WTP	WTP	WTP
Kota Depok	WTP	WTP	WTP
Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP
Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP

*Sumber: bpk.go.id, (2020)*

Dari Tabel 1.2. Trend Opini Audit LKPD Jawa Barat 2017-2019 bisa dilihat untuk TA 2019 entitas daerah keseluruhan di Jawa Barat mendapatkan prestasi yang sangat baik dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Jawa Barat, fenomena ini pertama kali Jawa Barat raih pasalnya pada tahun-

tahun sebelumnya masih terdapat entitas daerah di Jawa Barat yang belum mendapatkan opini WTP dari BPK.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat TA 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. BPK menemukan sembilan kelemahan pengendalian intern dan delapan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan Tahun 2019. Permasalahan tersebut antara lain terkait penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal yang belum sesuai ketentuan, penatausahaan Aset Tetap yang belum sepenuhnya tertib, pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum dilakukan secara memadai, serta kelebihan pembayaran pada beberapa pengadaan barang dan jasa (jabar.tribunnews.com, (2020).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan penelitian terdahulu meliputi kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengendalian intern (Yuliani, 2016); *good governance*, sistem pengendalian intern pemerintah (AgustiningTyas, 2020), standar akuntansi pemerintah dan penerapan teknologi informasi (Roni, 2015) faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun masih ditemukan beberapa inkonsistensi mengenai pengaruh dari variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor pertama yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern menurut Rahmawati (2018) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Merujuk dalam

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah kegiatan untuk memberikan keyakinan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah (Rahmawati, 2018). Pernyataan tersebut didukung dengan yang ada tercantum pada Lampiran I Permendagri No 4 Tahun 2008 Kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan, dan memelihara SPI yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal.

Penelitian yang dilakukan oleh AgustiningTyas (2020), Kalumata (2016) , Yaqin (2018) bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhri (2018) bahwa pengendalian internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal tersebut menjadikan teori yang tidak konsisten pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Selanjutnya faktor lain yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah adanya penerapan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Simarmata, 2020). Berdasarkan UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, memproses, mengumpulkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi. Menurut definisi berikut teknologi informasi dapat disimpulkan sebagai sebuah sarana yang dapat

membantu dalam pemerosesan transaksi atau data lainnya mulai dari mengumpulkan, menyimpan, memproses, menganalisis, hingga menyebarkan informasi, serta termasuk di dalamnya memanipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

Mengoptimalkan perangkat komputer dan penggunaan software aplikasi serta didukung oleh pemeliharaan yang rutin maka satuan kerja akan mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang dibutuhkan dan berkualitas (Roni, 2015). Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani, 2016) Laporan keuangan yang berkualitas dapat dicapai melalui pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Penerapan Teknologi Informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Roni, 2015), hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Kalumata (2016) serta penelitian oleh Dewi dan Hoesada (2020) bahwa penerapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun pernyataan tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Modo (2016) bahwa penerapan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, pernyataan tersebut juga di perkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudiarta (2015) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan inkonsistensi teori di atas maka variabel pemanfaatan teknologi informasi masih perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Selanjutnya determinan lain yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menurut Pujanira (2017) adalah kualitas sumber daya manusia. Menurut Marjuni (2015) sumber daya manusia atau yang dikenal dengan *human resource* merupakan kekayaan yang berasal dari manusia yang memiliki akal perasaan, keterampilan dan ilmu pengetahuan yang menciptakan sebuah karya. Potensi sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat berpengaruh dalam

pencapaian tujuan organisasi tersebut. Walaupun teknologi telah berkembang jika tidak ada sumber daya manusia sulit untuk mencapai tujuan tersebut (Marjuni, 2015). Menurut Arfianti dan Widodo dalam Oktafiani (2018) kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Kompetensi adalah sebuah konsep yang dapat dimaknai sebagai terjadinya kombinasi antara keterampilan seseorang (*skill*), atribut personal (*personal's attribute*), dan pengetahuan (*knowledge*) yang tercermin melalui perilaku kerja (*job behavior*), yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi melalui alat ukur tertentu (Nyoto, 2019).

Menurut Kalumata (2016) dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan, sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, SDM yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Pernyataan tersebut didukung oleh Pujanira (2017) bahwa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan. Menurut Sukadana (2015) kualitas sumber daya manusia memegang peranan dalam sebuah organisasi oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia dibidang akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2018), Agatha (2020), Pramita (2018) bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh AgustiningTyas (2020), Roni (2015) menyatakan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Maka dari itu tidak adanya konsistensi secara teori mengenai kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.



Berdasarkan fenomena dan beberapa kesimpulan dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2021”**.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) digunakan untuk menggambarkan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan ini juga bisa disebut laporan pertanggungjawaban penggunaan dana masyarakat, karena dana yang digunakan untuk kebutuhan daerah termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan daerah yang disampaikan harus disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) agar dapat dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemeriksaan dan opini audit yang menjadi dasar untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan daerah.

Fenomena yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Jawa Barat masih memiliki beberapa permasalahan. BPK menemukan sembilan kelemahan pengendalian intern dan delapan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan Tahun 2019. Permasalahan tersebut antara lain terkait penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal yang belum sesuai ketentuan, penatausahaan Aset Tetap yang belum sepenuhnya tertib, pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum dilakukan secara memadai, serta kelebihan pembayaran pada beberapa pengadaan barang dan jasa

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis dapat mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Pertanyaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal, penerapan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Kota Tasikmalaya tahun 2021?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan sistem pengendalian internal, penerapan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Kota Tasikmalaya tahun 2021?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
  - a. Sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Kota Tasikmalaya tahun 2021?
  - b. Penerapan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Kota Tasikmalaya tahun 2021?
  - c. kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Kota Tasikmalaya tahun 2021?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal, penerapan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Kota Tasikmalaya tahun 2021
2. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan sistem pengendalian internal, penerapan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Kota Tasikmalaya tahun 2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial:
  - a. Sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Kota Tasikmalaya tahun 2021.
  - b. Penerapan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Kota Tasikmalaya tahun 2021.

- c. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Kota Tasikmalaya tahun 2021.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka terdapat dua aspek kegunaan penelitian ini antara lain:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

- a. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, baik untuk para pembaca maupun penulis khususnya terhadap pengetahuan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, penerapan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Kota Tasikmalaya tahun 2021.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal, penerapan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan daerah.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan evaluasi terkait penilaian terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparatur pemerintah (khususnya aparatur Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya) yang dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Untuk memberikan gambaran penulisan dalam penelitian ini, berikut ini merupakan sistematika penulisan yang berisi informasi umum yang akan dibahas di setiap babnya.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum obek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, identifikasi variabel dependen dan independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari implikasi hasil penelitian, serta menyajikan keterbatasan-keterbatasan didalam penelitian.